

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria usaha mikro. Kriteria dari usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan No. 20 Tahun 2008. Dalam perekonomian Indonesia, UMKM memiliki peran strategis, baik dari sisi jumlah unit usaha, penyerapan tenaga kerja, dan sumbangan terhadap PDB.

Ketua Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun dalam ekonomi.bisnis.com menjelaskan bahwa, realisasi kontribusi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terhadap PDB nasional tahun 2018 mencapai sekitar 60,34%. Sedangkan kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto nasional sepanjang tahun 2019 diproyeksi tumbuh 5%. Berdasarkan estimasi pertumbuhan itu, dia meyakini total kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional tahun 2019 dapat mencapai 65% atau sekitar Rp2.394,5 triliun.

Disisi jumlah unit usaha, data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik dan United Nation Population Fund,

memprediksi jumlah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia pada 2018 sebanyak 58,97 juta orang. Sedangkan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2018 diprediksi mencapai 265 juta jiwa (www.keuangan.kontan.co.id).

Di Indonesia, salah satu provinsi yang memiliki UMKM terbanyak adalah DKI Jakarta. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, DKI Jakarta menempati urutan pertama dengan kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia dari tiga puluh empat provinsi yang lain. Dikarenakan keadaan seperti itu, menyebabkan kondisi UMKM di DKI Jakarta juga tergolong salah satu yang sangat pesat di Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah UMKM di DKI Jakarta semakin meningkat.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, pada tahun 2008, UMKM yang ada di DKI Jakarta sebanyak 7.696 unit. Lalu, pada tahun 2013 UMKM yang ada di DKI Jakarta sebanyak 16.545 unit. Jumlah UMKM di DKI Jakarta dari tahun 2008 sampai dengan 2013 meningkat sekitar 46% (Badan Pusat Statistik, 2015). Di tahun 2018 total UMKM binaan di DKI Jakarta berjumlah 185.584 (Sudin Koperasi dan UKM).

Dengan jumlah yang begitu besar, namun belum diimbangi dengan kualitas laporan keuangannya. Di dalam Laporan Perekonomian Indonesia tahun 2018 yang dipublikasi oleh Bank Indonesia menyatakan bahwa peran strategis UMKM mengindikasikan informasi dan monitoring terhadap kinerja

keuangan UMKM, selain kinerja dari sisi pembiayaan perbankan, perlu dilakukan dalam rangka memelihara stabilitas sistem keuangan. Namun, saat ini data kinerja keuangan UMKM tersebut belum tersedia, disebabkan oleh keterbatasan kapabilitas UMKM dalam menyusun laporan keuangan. Sehingga pada tahun 2018 Bank Indonesia melaksanakan Survei Laporan Keuangan UMKM (SLKU). Saat ini, semakin banyak masyarakat yang tertarik dengan UMKM. Dapat dibuktikan dengan UMKM mudah ditemui dimana saja. Tidak hanya di kota-kota besar, kini UMKM sudah bisa ditemui di lokasi yang terpencil sekalipun. Artinya unit UMKM meningkat setiap tahunnya. Keberadaan UMKM yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, memiliki peran sebagai pemerata ekonomi masyarakat Indonesia. Masyarakat kecil tak perlu berbondong-bondong pergi ke kota untuk memperoleh kehidupan yang layak.

UMKM yang kini terus bertambah pesat peningkatan jumlahnya dan semakin berkembang sektornya, seharusnya membuat pelaku UMKM sadar bahwa persaingan UMKM semakin ketat dan dibutuhkan laporan keuangan yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur dan informasi terperinci sampai sejauh mana usahanya dikelola. Realitanya, pelaku UMKM masih banyak yang tidak mementingkan laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena beberapa hal yang diantaranya pelaku UMKM tidak memiliki latar belakang pendidikan ekonomi, akuntansi atau manajemen, kurangnya pemahaman akuntansi oleh pelaku

UMKM, rumitnya siklus akuntansi; pelaku UMKM yang masih memiliki pemikiran bahwa laporan keuangan tidak terlalu penting, menyusun laporan keuangan hanya menambah pekerjaan; atau tidak memiliki dana yang memadai untuk mempekerjakan karyawan bagian keuangan.

Kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam memajukan usahanya adalah sulitnya mendapatkan program pinjaman bersubsidi yang dapat membuat meningkatnya pembangunan UMKM di Indonesia. Hal yang sering terjadi adalah UMKM seringkali menghadapi kesulitan dalam hal memenuhi persyaratan jaminan perbankan. Karena kecilnya usaha mereka cenderung tidak memiliki tanah atau sumber daya penting lainnya untuk melindungi aset keuangan mereka. Ketika perbankan menerapkan peminjaman yang didasari pada arus kas, jalan lainnya adalah pemerintah harus menciptakan lingkungan yang dapat memunculkan perusahaan sewa beli (*leasing*) maupun anjak piutang (*factoring*), yang dapat membantu UMKM untuk mendapatkan akses modal tanpa harus ada sejumlah jaminan pinjaman yang besar. Namun para pengusaha UMKM harus mampu membuat laporan keuangan untuk usahanya agar jelas harta yang dimiliki sehingga bank dapat memberi pinjaman. Penjaminan merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mengoreksi kegagalan pasar tidak semua usaha yang fleksibel bisa mengakses kredit karena ketidakmampuan memenuhi syarat minimal pemberian kredit oleh lembaga keuangan.

Direktur Utama Kantor Jasa Akuntansi (KJA), Softwan Aji menuturkan, di Kota Semarang tercatat hampir 90% UMKM yang tidak mempunyai perencanaan keuangan yang baik. Biasanya usaha yang digeluti lama kelamaan ambruk karena kurang telitinya mengelola sumber pendapatan UMKM tersebut. Menurutnya, sering tumbangya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), saat ini adalah kurang baiknya pengelolaan laporan keuangan. Hal ini sering menjadi kambing hitam tutupnya suatu bidang usaha apalagi yang baru dirintis. (www.kabar24.bisnis.com)

Hal senada juga dikatakan oleh pemimpin sentra kredit kecil BNI Cabang Surabaya, Hasan Supriadi bahwa di Surabaya, pengusaha pemula yang memiliki *visibility* sangat kecil sekali. Tidak lebih dari 10 persen. Laporan keuangan ini penting untuk mengukur analog kesehatan suatu usaha. Dari sini, pihak bank akan tahu seberapa besar kredit akan diberikan, atau tidak sama sekali. (www.merdeka.com)

Pada tanggal 26 Januari 2008, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden No.2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan. Melalui lembaga penjaminan tersebut diharapkan memberikan dampak terhadap pertumbuhan usaha UMKM. Jika UMKM tumbuh, akan dapat meningkatkan usaha, nilai tambah, lapangan kerja, serta penerimaan pemerintah (www.bi.go.id).

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan hingga saat ini sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih terkendala oleh laporan keuangan. Kondisi ini menjadi kendala dalam mengakses kredit dari lembaga keuangan. Hal seperti itu akan berdampak negatif bagi perkembangan UMKM termasuk salah satunya adalah produktivitas menjadi rendah karena kurangnya modal. Dengan masih buruknya laporan keuangan akan mempersulit perbankan melakukan analisa kelayakan pemberian kredit kepada pelaku UMKM. Sehingga akhirnya menimbulkan *information gap* dalam proses mengakses modal.

Salah satu program pemerintah Indonesia terkait pembiayaan UMKM adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Tujuan dari KUR tersebut adalah untuk menjadi solusi pembiayaan modal yang efektif bagi UMKM, sebab selama ini banyak UMKM yang terkendala untuk akses terhadap perbankan untuk mendapatkan bantuan pembiayaan (Osa, 2010 dalam Rudiantoro dan Veronica Siregar, 2011). Penyebab masih rendahnya penyaluran KUR tersebut karena bank yang ditunjuk sebagai penyalur KUR masih telalu berhati-hati dalam penyaluran kredit, karena tidak memiliki akses informasi yang memadai terkait kondisi UMKM. Pelaksanaan pembukuan akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan merupakan hal yang masih sulit bagi UMKM. Keterbatasan pengetahuan pembukuan akuntansi, rumitnya proses akuntansi, dan anggapan bahwa laporan keuangan bukanlah hal yang penting bagi UMKM (Said, 2009

dalam Rudiantoro dan Veronika Siregar 2011). Berbagai macam keterbatasan lain dihadapi oleh UMKM mulai dari latar belakang pendidikan yang tidak mengenal akuntansi atau tata buku, kurang disiplin dan rajinnya dalam pelaksanaan pembukuan akuntansi, hingga tidak adanya kecukupan dana untuk mempekerjakan akuntan atau membeli software akuntansi untuk mempermudah pelaksanaan pembukuan akuntansi.

Dilihat dari sisi Perpajakan bagi Koperasi dan UMKM, secara eksplisit dinyatakan dalam PP 46 tahun 2013, sulit dipungkiri bahwa yang menjadi target pemajakan dalam ketentuan perpajakan dimaksud adalah Koperasi dan UMKM yang berimplikasi terhadap tarif kompetitif dan kesederhanaan dalam pemenuhan kewajiban pelaporan pajak tahunan. Dalam rangka optimalisasi dan edukasi atas kebijakan dan teknis perhitungan perpajakan bagi wajib pajak yang dikenai pajak penghasilan bersifat final. Sebagian besar pelaku UMKM masih belum mengerti akuntansi atau pembuatan laporan keuangan yang standard. Kegiatan yang dilakukan yaitu: a. Sehubungan permintaan dan desakan berbagai kalangan seperti Dekopin, gerakan koperasi, asosiasi UMKM dan Pemda untuk melakukan peninjauan kembali PP Nomor 46 Tahun 2013 khusus terkait pajak final 1 persen dari omzet hingga Rp. 4,8 milyar per tahun telah dilakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, dan Kementerian Hukum dan HAM untuk merevisi PP Nomor 46 Tahun 2013. b. Kegiatan Bimteksos Advokasi

Perpajakan bagi Koperasi dan UMKM pada Asdep Pembiayaan Non Bank dan Perpajakan bekerja sama dengan DJP, praktisi dan Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM untuk tahun 2015-2016 dengan target 650 Koperasi dan UMKM telah dilaksanakan di 12 (dua belas) Provinsi/Kabupaten/ Kota antara lain Provinsi Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Aceh, Kalimantan Selatan, Banten, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara, Kabupaten Malang, Banyumas dan Kota Batam dengan masing-masing Prov/Kab/Kota 50 Koperasi dan UMKM.

Pada kenyataannya, selain di sisi bahwa laporan keuangan memang rumit untuk diterapkan namun laporan keuangan memiliki banyak manfaat yang bisa membuat usaha semakin berkembang. Laporan keuangan bisa menjadi informasi keuangan yang lebih terperinci mengenai aset yang dimiliki dan sudah terpakai, kewajiban yang harus diselesaikan, modal yang ditanamkan, informasi tentang laba dan penggunaan biaya operasional dan lain-lain. Laporan keuangan bisa dijadikan sebagai tolak ukur sejauh mana usaha telah berkembang. Laporan keuangan dapat mengukur kinerja keuangan unit usaha, menghitung pajak yang harus dibayarkan dan manfaat lainnya (Warsono, 2010).

Terkait dengan kondisi di atas, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada tahun 2009 telah mensahkan Standar Akuntansi untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). SAK ETAP tersebut sudah

dijalankan efektif per 1 Januari 2011. Penggunaan SAK ETAP ini adalah ditujukan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik yakni entitas yang 1) Tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan, dan 2) Entitas yang menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik merupakan salah satu Standar Akuntansi yang penggunaannya ditujukan untuk entitas usaha yang tidak memiliki akuntabilitas publik, seperti entitas usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Dan SAK ETAP menggunakan acuan IFRS (*International Financial Reporting Standards*) untuk *Small Medium Enterprises*.

Selanjutnya, pada tahun 2016, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyiapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM). SAK EMKM merupakan standar akuntansi keuangan yang jauh lebih sederhana dibandingkan dengan SAK ETAP. Misalnya dari sisi teknis, SAK EMKM murni menggunakan dasar pengukuran biaya historis sehingga EMKM cukup mencatat aset dan liabilitasnya sebesar biaya perolehannya (iaiglobal.or.id). IAI menyatakan bahwa SAK EMKM ini berlaku efektif sejak 1 Januari 2018.

Laporan keuangan yang di susun oleh pelaku UMKM pun harus berkualitas agar dapat dijadikan tolak ukur yang relevan dalam pengembangan usahanya. Kualitas laporan keuangan dalam penelitian ini adalah pemahaman UMKM terhadap laporan keuangan berdasarkan SAK yang berlaku dalam

membantu UMKM mengembangkan usahanya. Rudiantoro dan Siregar (2012) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa kualitas laporan keuangan UMKM di Indonesia saat itu masih tergolong rendah. Rendahnya kualitas laporan keuangan UMKM disebabkan oleh banyak faktor yang mempengaruhinya.

Fitriawati (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Kualitas laporan keuangan untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan prospek implementasi standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP)” mengemukakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan UMKM. Faktor-faktor tersebut diantaranya yaitu jenjang pendidikan terakhir, ukuran usaha, lama usaha berdiri, latar belakang pendidikan, informasi dan sosialisasi SAK ETAP. Namun dalam penelitian ini, peneliti akan menguji lima variabel yang diduga mempengaruhi kualitas laporan keuangan UMKM yaitu umur usaha, jenjang pendidikan, pengetahuan akuntansi, sosialisasi akuntansi dan teknologi informasi.

Jenjang pendidikan merupakan pendidikan formal yang pernah diikuti oleh pemilik UMKM, baik itu kompetensi atau kejuruan di bidang akuntansi, ekonomi atau manajemen. Pengetahuan akuntansi merupakan pengetahuan keakuntansian yang dimiliki pengusaha kecil dan menengah.. Secara umum, tidak semua pelaku UMKM memiliki latar pendidikan akuntansi atau ekonomi. Saat ini sebagian besar pelaku UMKM di Indonesia, berpendidikan di tingkat SD hingga SMP. Jumlah pelaku usaha mikro kecil rata-rata pendidikan SD

hingga SMP mencapai 57,9 juta orang (republika, 2018). Dengan realita seperti itu, jangankan memiliki pemahaman akuntansi yang baik, secaratingkat pendidikan saja masih rendah.

Untuk mengatasi masalah kemampuan akuntansi para pelaku UMKM, hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan adanya sosialisasi berupa pelatihan kewirausahaan. Sosialisasi dan informasi akuntansi merupakan cara untuk mengenalkan dan membantu UMKM dalam mengetahui serta memahami tentang standar akuntansi berdasarkan pendapat Rias Tuti (dalam Ita Prawesti, 2014). Pelatihan Kewirausahaan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan dan potensi diri dalam berwirausaha, sehingga mampu mengelola usahanya secara kreatif, inovatif dan berdaya saing baik dari aspek perencanaan, produksi, pemasaran, keuangan, pemanfaatan teknologi dan sumber daya baik alam (bahan baku), manusia (pengelola) dan modal.

Namun, mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019, Kementerian Koperasi dan UKM telah menetapkan rencana program kerja prioritas, diantaranya adalah: Fasilitasi Permodalan bagi Wirausaha Pemula, Revitalisasi Pasar Tradisional, Pelatihan peningkatan kapasitas bagi SDM KUMKM, antara lain; Pelatihan Kewirausahaan, Pelatihan Perkoperasian, Pelatihan Technopreneur, Pelatihan Vocational, dan Pelatihan berbasis kompetensi (www.depkop.go.id). Dilihat dari rencana tersebut dapat diartikan

bahwa kementerian KUMKM pun belum membuat program sosialisasi dalam hal membuat laporan keuangan menjadi program tersendiri dalam perencanaan kerjanya.

Di sisi lain, pada era digital seperti saat ini, semakin berkembang *software* untuk menyusun laporan keuangan baik dalam lingkup besar maupun sederhana. Akses untuk mendapatkan software atau aplikasi tersebut pun sangat mudah. mulai dari aplikasi gratis hingga berbayar serta dari aplikasi berbasis android hingga aplikasi berbasis komputer. Berbagai pengembang (*developer*) aplikasi android sudah menyediakan berbagai macam aplikasi akuntansi berbasis android, bahkan bank indonesia meluncurkan aplikasi akuntansi berbasis android yang diberi nama "si apik", begitu pula kementerian koperasi dan ukm meluncurkan aplikasi akuntansi berbasis android bernama "lamikro". Tercatat lebih dari 10.000 aplikasi si apik diunduh, begitu pula aplikasi la mikro lebih dari 10.000 sudah diunduh dari playstore. Hal ini mencerminkan bahwasanya kemajuan teknologi informasi dibutuhkan oleh para pelaku UMKM guna memudahkan dalam membuat laporan keuangan.

Kemudahan memperoleh *software* akuntansi ini seharusnya dapat membantu para pelaku umkm dalam menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Akan tetapi penggunaan aplikasi-aplikasi tersebut juga membutuhkan pengguna yang mengerti dasar-dasar akuntansi untuk mengoperasikannya. Selain permasalahan yang timbul dari pengguna,

penggunaan aplikasi akuntansi ini juga harus berhati-hati. Di era big data seperti saat ini data merupakan aset berharga, terlebih data akuntansi yang dapat memberikan informasi akurat kondisi sebuah usaha, maka memilih aplikasi terpercaya harus diperhatikan.

Ada beberapa perbedaan hasil penelitian dengan variabel yang sama dan judul yang serupa. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Djosua (2014), latar belakang pendidikan memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan UMKM. Namun hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hadi (2016) dan Mulyani (2014). Dalam penelitian mereka, latar belakang pendidikan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan UMKM. Lalu untuk variabel umur usaha dalam penelitian Lestari (2017), hasil penelitiannya yaitu umur usaha berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan UMKM namun dalam penelitian Mulyani (2014), umur usaha tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan UMKM. Selanjutnya, dalam penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2017), variabel pemberian informasi dan sosialisasi akuntansi memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan UMKM. Hasil penelitian Lestari berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Tuti (2015). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wiranata (2015) dan Purwati (2014) teknologi informasi menjadi faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan UMKM.

Dari hasil penelitian diatas, menunjukkan bahwa adanya ketidakkonsistenan dari hasil penelitian-penelitian terdahulu antara umur usaha, jenjang pendidikan dan juga pengetahuan akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan UMKM. Dalam penelitian itu ada hasilnya yang berpengaruh signifikan, namun ada pula yang tidak berpengaruh. Maka dari itu, peneliti kembali meneliti faktor-faktor itu untuk menambah kasanah dan menguatkan penelitian yang ada.

Selain itu juga masih sedikitnya penelitian yang menguji faktor teknologi informasi. Hal ini bisa jadi dikarenakan memang baru berkembangnya teknologi informasi di zaman ini. Maka dari itu dibutuhkan bukti empiris baru terkait masih sedikitnya literasi berkaitan faktor teknologi informasi. Dalam penelitian ini juga menjadikan SAK EMKM sebagai standar laporan keuangan yang diuji.

Peneliti juga merupakan pelaku UMKM yang meyakini bahwa faktor-faktor itu dapat menjadi faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan khususnya untuk segmen UMKM.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Umur Usaha, Jenjang Pendidikan, Pengetahuan Akuntansi, Sosialisasi Akuntansi, dan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan UMKM di Kecamatan Jatinegara”**

B. Perumusan Masalah

Permasalahan pokok yang telah disebutkan sebelumnya pada latar belakang, yang memperlihatkan masih banyaknya pelaku UMKM yang belum membuat laporan keuangan dengan baik, yang akhirnya membuat para pelaku UMKM sulit mengembangkan usahanya dikarenakan kesulitan mendapatkan pembiayaan modal. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat realisasi KUR hingga Juli 2018 mencapai 79,2 triliun rupiah atau 67,6 persen dari target penyaluran 117,08 triliun rupiah (www.koran-jakarta.com). Hal ini disebabkan karena masih banyak UMKM yang tidak lolos persyaratan yang diantaranya adalah kualitas laporan keuangan. maka peneliti dapat merumuskan beberapa permasalahan yang terjadi, yaitu:

1. Umur usaha berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan UMKM
2. Jenjang Pendidikan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan UMKM
3. Pengetahuan akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan UMKM
4. Sosialisasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan UMKM
5. Teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan UMKM

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan UMKM
2. Untuk mengetahui apakah pengetahuan akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan UMKM
3. Untuk mengetahui apakah umur usaha berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan UMKM
4. Untuk mengetahui apakah sosialisasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan UMKM
5. Untuk mengetahui apakah teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan UMKM

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis terhadap berbagai pihak yang memiliki hubungan dengan penelitian ini. Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Melalui penelitian ini, peneliti mencoba memberikan bukti dengan variabel-variabel latar belakang pendidikan, pemahaman akuntansi, umur usaha, sosialisasi akuntansi, dan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan UMKM.
- b. Bagi peneliti lain diharapkan dapat menambah wawasan serta dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang lebih mendalam mengenai kualitas laporan keuangan UMKM.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat membuat pelaku UMKM sadar mengenai pentingnya menyusun laporan keuangan.
- b. Pihak-pihak yang memiliki tugas sebagai pemberi informasi dan sosialisasi akuntansi agar lebih giat lagi melakukan sosialisasi agar pelaku UMKM lebih paham mengenai informasi akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku.
- c. Penelitian ini diharapkan sebagai salah satu referensi agar dapat mengetahui kualitas laporan keuangan UMKM pada saat ini.